



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KAMPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3.
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.deptan.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR: 191/Kpts/RC. 110/7/2014

TENTANG

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR PEMBANGUNAN
KEBUN PESERTA PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 192/Kpts/RC.110/6/2013, telah ditetapkan Satuan Biaya Maksimum Per Hektar Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2013;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian biaya satuan harga sarana produksi pada standar teknis dan agar pelaksanaan penerapan satuan biaya maksimum pembangunan kebun peserta program revitalisasi perkebunan dapat dilakukan sesuai standar teknis, perlu menetapkan Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
8. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1052/Kpts/OT.160/2/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 141/Kpts/LB.110/06/2010 tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Revitalisasi Perkebunan.

Memerhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-623/MK.05/2010 tanggal 29 November 2010 Perihal Perpanjangan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Satuan Biaya Maksimum Per Hektar Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Untuk biaya riil di lapangan, lebih lanjut akan ditentukan bersama antara Bank Pelaksana dengan Calon Nasabah/Peserta Program Revitalisasi Perkebunan dengan memerhatikan kondisi lokasi pengembangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Juli 2014



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Menteri Pekerjaan Umum;
11. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
12. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
16. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
17. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
18. Gubernur Bank Indonesia;
19. Gubernur Seluruh Indonesia;
20. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
21. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
22. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
23. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
24. Direktur Utama PT BUKOPIN;
25. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut);
26. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari);
27. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel);
28. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua);
29. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Agro (Persero) Tbk;
30. Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk;
31. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Bank Aceh);
32. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Bank Riau Kepri);
33. Direktur Utama PT Bank Internasional Indonesia Tbk;
34. Direktur Utama PT Bank Mega Tbk;
35. Direktur Utama PT Bank Artha Graha Tbk;
36. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bank Kaltim);
37. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra);
38. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
39. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR PERLUASAN KELAPA SAWIT DI LAHAN KERING TAHUN 2014 (KEMITRAAN)

-1-

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	PO Pembukaan lahan dan penanaman - Tenaga Kerja - Infrastruktur / Terasering - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5% - Sertifikasi Lahan	Rp 23,581,000	24,342,000	24,630,000	24,307,000	24,872,000	25,697,000	27,331,000
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 10,557,000	11,276,000	11,534,000	11,161,000	12,159,000	12,422,000	13,855,000
3	P2 Pemeliharaan tahun kedua - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 9,446,000	10,247,000	10,517,000	10,079,000	10,864,000	11,503,000	13,111,000
4	P3 Pemeliharaan tahun ketiga - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 10,317,000	11,197,000	11,475,000	10,995,000	11,842,000	12,542,000	14,260,000
	Jumlah P0+P1+P2+P3	Rp 53,901,000	57,062,000	58,156,000	56,542,000	59,737,000	62,164,000	68,557,000

Catatan:
Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali.
Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung.
Wilayah III : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.
Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Wilayah VI : Maluku dan Maluku Utara.
Wilayah VII : Papua dan Papua Barat.


DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
GAMAL NASIR

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR PEREMAJAAN KELAPA SAWIT DI LAHAN KERING TAHUN 2014 (KEMITRAAN)

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	PO Pembukaan lahan dan penanaman - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5% - Sertifikasi Lahan	Rp 12,047,000	12,688,000	13,240,000	13,006,000	13,296,000	14,153,000	15,633,000
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 10,908,000	11,773,000	12,021,000	11,514,000	12,438,000	13,067,000	14,647,000
3	P2 Pemeliharaan tahun kedua - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 11,702,000	12,611,000	12,875,000	12,335,000	13,229,000	13,976,000	15,693,000
4	P3 Pemeliharaan tahun ketiga - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 12,127,000	13,082,000	13,354,000	12,805,000	13,727,000	14,502,000	16,295,000
	Jumlah P0+P1+P2+P3	Rp 46,784,000	50,154,000	51,490,000	49,660,000	52,690,000	55,698,000	62,268,000

Catatan:
Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali.
Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung.
Wilayah III : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.
Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Wilayah VI : Maluku dan Maluku Utara.
Wilayah VII : Papua dan Papua Barat.


DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

GAMAL NASIR

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR PERLUASAN KARET TAHUN 2014 (KEMITRAAN)

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	PO Pembukaan lahan dan penanaman - Tenaga Kerja - Infrastruktur / Terasering - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5% - Sertifikasi Lahan	Rp 25,105,000	25,850,000	25,250,000	24,973,000	25,647,000	26,329,000	28,854,000
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 5,740,000	6,402,000	6,665,000	6,450,000	6,877,000	7,341,000	8,218,000
3	P2 Pemeliharaan tahun kedua - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 4,613,000	5,254,000	5,612,000	5,611,000	5,868,000	6,199,000	7,074,000
4	P3 Pemeliharaan tahun ketiga - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 5,026,000	5,708,000	6,078,000	6,035,000	6,332,000	6,703,000	7,657,000
5	P4 Pemeliharaan tahun keempat - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 4,580,000	5,298,000	5,692,000	5,720,000	5,962,000	6,296,000	7,255,000
6	P5 Pemeliharaan tahun kelima - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 6,426,000	7,171,000	7,591,000	7,588,000	7,857,000	8,217,000	9,216,000
Jumlah P0+P1+P2+P3+P4+P5		Rp 51,490,000	55,683,000	56,888,000	56,377,000	58,543,000	61,085,000	68,274,000

Catatan:
Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali.
Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung.
Wilayah III : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.
Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Wilayah VI : Maluku dan Maluku Utara.
Wilayah VII : Papua dan Papua Barat.


DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

GAMAL NASIR

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR PEREMAJAAN KARET TAHUN 2014 (KEMITRAAN)

-4-

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	PO Pembukaan lahan dan penanaman - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5% - Sertifikasi Lahan	Rp 23,215,000	23,960,000	23,360,000	23,083,000	23,757,000	24,439,000	26,964,000
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 5,515,000	6,158,000	6,402,000	6,169,000	6,577,000	7,022,000	7,723,000
3	P2 Pemeliharaan tahun kedua - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 4,309,000	4,926,000	5,259,000	5,232,000	5,464,000	5,769,000	6,408,000
4	P3 Pemeliharaan tahun ketiga - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 4,714,000	5,370,000	5,715,000	5,645,000	5,916,000	6,262,000	6,972,000
5	P4 Pemeliharaan tahun keempat - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 4,233,000	4,923,000	5,288,000	5,287,000	5,500,000	5,805,000	6,493,000
6	P5 Pemeliharaan tahun kelima - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 6,080,000	6,796,000	7,186,000	7,155,000	7,395,000	7,726,000	8,455,000
	Jumlah P0+P1+P2+P3+P4+P5	Rp 48,066,000	52,133,000	53,210,000	52,571,000	54,609,000	57,023,000	63,015,000

Catatan:
Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali.
Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung.
Wilayah III : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.
Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Wilayah VI : Maluku dan Maluku Utara.
Wilayah VII : Papua dan Papua Barat.


DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

GAMAL NASIR

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR PERLUASAN KARET TAHUN 2014 (NON KEMITRAAN)

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	PO Pembukaan lahan dan penanaman - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Sertifikasi Lahan	Rp 20,459,000	21,308,000	20,725,000	20,300,000	21,081,000	21,870,000	24,321,000
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 5,279,000	5,894,000	6,126,000	5,901,000	6,293,000	6,719,000	7,389,000
3	P2 Pemeliharaan tahun kedua - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 4,132,000	4,721,000	5,038,000	5,011,000	5,234,000	5,527,000	6,138,000
4	P3 Pemeliharaan tahun ketiga - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 4,490,000	5,115,000	5,442,000	5,376,000	5,635,000	5,963,000	6,640,000
5	P4 Pemeliharaan tahun keempat - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 4,062,000	4,722,000	5,069,000	5,066,000	5,272,000	5,565,000	6,224,000
6	P5 Pemeliharaan tahun kelima - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 5,790,000	6,472,000	6,844,000	6,814,000	7,043,000	7,358,000	8,053,000
	Jumlah P0+P1+P2+P3+P4+P5	Rp 44,212,000	48,232,000	49,244,000	48,468,000	50,558,000	53,002,000	58,765,000

Catatan:
Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali.
Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung.
Wilayah III : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.
Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Wilayah VI : Maluku dan Maluku Utara.
Wilayah VII : Papua dan Papua Barat.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
GAMAL NASIR

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR PEREMAJAAN KARET TAHUN 2014 (NON KEMITRAAN)

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	PO Pembukaan lahan dan penanaman - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Sertifikasi Lahan	Rp 18,959,000	19,658,000	19,075,000	18,800,000	19,431,000	20,070,000	22,371,000
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 5,279,000	5,894,000	6,126,000	5,901,000	6,293,000	6,719,000	7,389,000
3	P2 Pemeliharaan tahun kedua - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 4,132,000	4,721,000	5,038,000	5,011,000	5,234,000	5,527,000	6,138,000
4	P3 Pemeliharaan tahun ketiga - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 4,490,000	5,115,000	5,442,000	5,376,000	5,635,000	5,963,000	6,640,000
5	P4 Pemeliharaan tahun keempat - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 4,062,000	4,722,000	5,069,000	5,066,000	5,272,000	5,565,000	6,224,000
6	P5 Pemeliharaan tahun kelima - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 5,790,455	6,472,400	6,844,000	6,814,455	7,043,000	7,358,000	8,053,000
	Jumlah P0+P1+P2+P3+P4+P5	Rp 42,712,455	46,582,400	47,594,000	46,968,455	48,908,000	51,202,000	56,815,000

Catatan:
Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali.
Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung.
Wilayah III : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.
Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Wilayah VI : Maluku dan Maluku Utara.
Wilayah VII : Papua dan Papua Barat.


DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
GAMAL NASIR

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR PERLUASAN /PEREMAJAHAN KAKAO TAHUN 2014 (NON KEMITRAAN)

-9-

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	LC Pembukaan lahan - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan dan Alat - Sertifikasi Lahan	Rp 11,407,000	12,342,000	12,390,000	11,407,000	12,342,000	13,277,000	14,232,000
2	P0 Penanaman - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 15,403,000	16,262,000	19,319,000	19,526,000	20,288,000	21,362,000	26,161,000
3	P1 Pemeliharaan tahun Pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 5,658,000	6,361,000	6,519,000	6,259,000	6,845,000	7,068,000	7,706,000
4	P2 Pemeliharaan tahun kedua - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 4,923,000	5,656,000	5,844,000	5,690,000	6,148,000	6,397,000	7,053,000
5	P3 Pemeliharaan tahun ketiga - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 9,124,000	10,244,000	10,627,000	10,576,000	11,286,000	12,067,000	13,140,000
	Jumlah LC+P0+P1+P2+P3	Rp 46,515,000	50,865,000	54,699,000	53,458,000	56,909,000	60,171,000	68,292,000

Catatan:
Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali.
Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung.
Wilayah III : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.
Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Wilayah VI : Maluku dan Maluku Utara.
Wilayah VII : Papua dan Papua Barat.


DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

GAMAL NASIR

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR REHABILITASI KAKAO TAHUN 2014 (KEMITRAAN)

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	P0 Sambung samping - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5% - Sertifikasi Lahan	Rp 37,773,000	41,442,000	41,635,000	38,540,000	41,934,000	45,768,000	48,710,000
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 9,366,000	10,520,000	10,923,000	10,890,000	11,614,000	12,412,000	13,518,000
	Jumlah P0+P1	Rp 47,139,000	51,962,000	52,558,000	49,430,000	53,548,000	58,180,000	62,228,000

Catatan:
Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali.
Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung.
Wilayah III : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.
Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Wilayah VI : Maluku dan Maluku Utara.
Wilayah VII : Papua dan Papua Barat.


DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

GAMAL NASIR

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR PERLUASAN /PEREMAJAAN KAKAO TAHUN 2014 (KEMITRAAN)

-7-

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	LC Pembukaan lahan - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5% - Sertifikasi Lahan	Rp 11,902,000	12,884,000	12,935,000	11,902,000	12,884,000	13,866,000	14,869,000
2	P0 Penanaman - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 16,173,000	17,076,000	20,285,000	20,502,000	21,303,000	22,430,000	27,469,000
3	P1 Pemeliharaan tahun Pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 5,941,000	6,679,000	6,845,000	6,571,000	7,187,000	7,421,000	8,091,000
4	P2 Pemeliharaan tahun kedua - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 5,169,000	5,939,000	6,136,000	5,974,000	6,456,000	6,717,000	7,406,000
5	P3 Pemeliharaan tahun ketiga - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 9,580,000	10,756,000	11,159,000	11,105,000	11,850,000	12,670,000	13,797,000
Jumlah LC+P0+P1+P2+P3		Rp 48,765,000	53,334,000	57,360,000	56,054,000	59,680,000	63,104,000	71,632,000

Catatan:
Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali.
Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung.
Wilayah III : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.
Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Wilayah VI : Maluku dan Maluku Utara.
Wilayah VII : Papua dan Papua Barat.


DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

GAMAL NASIR

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR REHABILITASI KAKAO TAHUN 2014 (NON KEMITRAAN)

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	P0 Sambung samping - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Sertifikasi Lahan	Rp 39,273,000	42,942,000	43,135,000	40,040,000	43,434,000	47,268,000	50,210,000
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	Rp 8,920,000	10,019,000	10,402,000	10,372,000	11,061,000	11,821,000	12,874,000
	Jumlah P0+P1	Rp 48,193,000	52,961,000	53,537,000	50,412,000	54,495,000	59,089,000	63,084,000

Catatan:
Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali.
Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung.
Wilayah III : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.
Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Wilayah VI : Maluku dan Maluku Utara.
Wilayah VII : Papua dan Papua Barat.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

GAMAL NASIR

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR PERLUASAN KELAPA SAWIT DI LAHAN BASAH TAHUN 2014 (KEMITRAAN)

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	PO Pembukaan lahan dan penanaman - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5% - Sertifikasi Lahan	Rp 35,759,000	36,599,000	37,195,000	35,350,000	35,751,000	36,825,000	38,702,000
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 8,663,000	9,344,000	9,427,000	9,038,000	9,618,000	10,015,000	10,963,000
3	P2 Pemeliharaan tahun kedua - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 8,278,000	8,800,000	8,990,000	9,062,000	9,286,000	9,826,000	10,824,000
4	P3 Pemeliharaan tahun ketiga - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 9,683,000	10,442,000	10,514,000	10,515,000	10,911,000	11,384,000	12,525,000
	Jumlah P0+P1+P2+P3	Rp 62,383,000	65,185,000	66,126,000	63,965,000	65,566,000	68,050,000	73,014,000

Catatan:
Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali.
Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung.
Wilayah III : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.
Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Wilayah VI : Maluku dan Maluku Utara.
Wilayah VII : Papua dan Papua Barat.


DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

GAMAL NASIR